



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi administrasi pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu adanya pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelimpahan kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

GW

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);

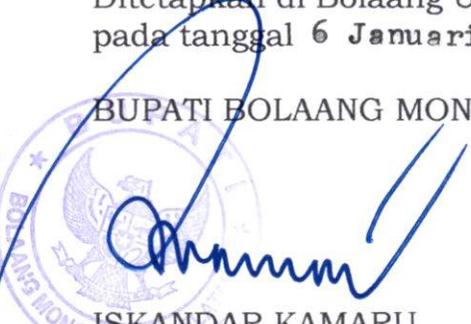
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelimpahan Kewenangan dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	


ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
 KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN
 ANGGARAN 2025

Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran
 Tahun Anggaran 2025

NO.	UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PELIMPAHAN KEWENANGAN (PROGRAM KEGIATAN)
1.	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	MARZANSIUS ARVAN OHY, S.STP, MAP NIP. 19770318 199511 1 001	RIZKA MAYULU, SE,M.Si NIP. 19891117 201402 2 001	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD: a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; c. penyediaan barang cetakan dan penggandaan; d. fasilitasi kunjungan tamu; e. pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; f. pengadaan peralatan dan mesin lainnya; g. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; h. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; i. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; j. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; k. penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah; l. penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah; dan m. penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah.

SW

2.	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH		INDRAJAYA MOKOAGOW, S.IP NIP. 19851126 200604 1 006	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD: a. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; b. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak; c. kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; dan d. penataan administrasi pemerintahan. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN: a. fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah; dan b. fasilitasi kerja sama dalam negeri.
3.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		FITRIANI MAYULU, S.Pi, ME NIP. 19731023 2008032003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD: a. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; b. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak; c. kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; dan d. pengendalian dan evaluasi program pembangunan.
4.	BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH		ARFAN JAFAR, S.Pd NIP. 19810505 200902 1 001	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD: a. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; b. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak; c. kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; d. fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual; e. pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait; dan f. kesejahteraan sosial.

Sm

5.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH		ARMEIN OINTU, ST. NIP. 19800514 201104 1 001	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD: a. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak; b. kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; c. pengelolaan pengadaan barang dan jasa; d. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan e. pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
6.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		SHANDI PRATAMA LAMATO, S.Kom NIP. 19830520 200902 1 003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD: a. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan b. penyediaan barang cetakan dan penggandaan c. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD d. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; e. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak; f. kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; g. penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah; h. fasilitasi keprotokolan; i. fasilitasi komunikasi pimpinan; dan j. pendokumentasian tugas pimpinan.
7.	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH		EVI HASTUTI, S.H., M.H. NIP. 19830119 201503 2 002	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD: a. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan; c. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

SN

				<ul style="list-style-type: none"> d. pengadaan peralatan dan mesin lainnya; e. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; f. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; g. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak; h. kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; i. fasilitasi penyusunan produk hukum daerah; j. fasilitasi bantuan hukum; dan k. pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum.
8.	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH		<p>ROSARIAH MASUARA, ST NIP. 19751023 200701 2 015</p>	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan barang cetakan dan penggandaan; b. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; c. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak; d. kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; e. pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan; f. fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana; g. peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; dan h. monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana.
9.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		<p>SYUKRI F. VAN GOBEL, SP, MM NIP. 19730619 201104 1 001</p>	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; b. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak; c. kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; d. pelaksanaan kebijakan perekonomian; dan e. pengendalian dan distribusi perekonomian.

GW

10.	PUSKESMAS MOMALIA	SAIPUL N. BOTUTIHE, SKM NIP. 19740911 199703 1 004	JEFRI STIAWAN NGANTUNG, A.Md, Kep NIP. 19870624 201001 1 001	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; c. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; d. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; e. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; f. pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; g. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; h. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; i. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; j. pengelolaan surveilans kesehatan; k. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa; l. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; m. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; n. operasional pelayanan puskesmas; o. pengelolaan pelayanan kesehatan malaria; p. pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi; q. pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak; r. pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan; dan s. bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
11.	PUSKESMAS MILANGODAA		MELINDAH HUKO, A.Md.Keb. NIP. 19881121 201104 2 001	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; c. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;

SW

				<ul style="list-style-type: none"> d. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; e. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; f. pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; g. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; h. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; i. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; j. pengelolaan surveilans kesehatan; k. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa; l. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; m. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; n. operasional pelayanan puskesmas; o. pengelolaan pelayanan kesehatan malaria; p. pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi; q. pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan; dan r. bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
12.	PUSKESMAS DUMINANGA		SRIWAHYUNI KADULLAH, S.Kep NIP. 19860301 201104 2 001	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; c. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; d. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; e. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; f. pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

SW

				<ul style="list-style-type: none"> g. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; h. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; i. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; j. pengelolaan surveilans kesehatan; k. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa; l. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; m. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; n. operasional pelayanan puskesmas; o. pengelolaan pelayanan kesehatan malaria; p. pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi; q. pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak; r. pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan; dan s. bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
13.	PUSKESMAS MOLIBAGU		FADLUN GOBEL, A.Md.Keb. NIP. 19710628 199001 2 001	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; c. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; d. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; e. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; f. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; g. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; h. pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

aw

				<ul style="list-style-type: none"> i. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; j. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; k. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; l. pengelolaan surveilans kesehatan; m. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa; n. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; o. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; p. operasional pelayanan puskesmas; q. pengelolaan pelayanan kesehatan malaria; r. pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi; s. pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak; t. pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan; u. pengelolaan layanan imunisasi; dan v. bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
14.	PUSKESMAS PINOLOSIAN		<p>HILDA KUMANGKI, A.Md.Kep NIP. 19791011 200501 2 012</p>	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; c. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; d. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; e. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; f. pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; g. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; h. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; i. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;

CN

				<ul style="list-style-type: none"> j. pengelolaan surveilans kesehatan; k. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa; l. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; m. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; n. operasional pelayanan puskesmas; o. pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi; p. pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak; dan q. pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan
15.	PUSKESMAS ADOW		<p>I WAYAN SUGIRI, A.Md.Kep NIP. 19710913 199703 1 007</p>	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; c. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; d. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin; e. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut; g. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; h. pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; i. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; j. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; k. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; l. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; m. pengelolaan surveilans kesehatan; n. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa; o. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;

W

				<ul style="list-style-type: none"> p. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; q. operasional pelayanan puskesmas; r. investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal); s. pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah; t. pengelolaan pelayanan kesehatan malaria; u. pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi; v. pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak; dan w. bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
16.	PUSKESMAS ONGGUNOI		<p>KHADAFI LANGKAU, A.Md.Kep. NIP. 19880427 201402 1 002</p>	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; c. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; d. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; e. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; f. pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; g. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; h. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; i. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; j. pengelolaan surveilans kesehatan; k. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa; l. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; m. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; n. operasional pelayanan puskesmas;

fw

			<ul style="list-style-type: none"> o. pengelolaan pelayanan kesehatan malaria; p. pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi; q. pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak; r. pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan; dan s. bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
17.	PUSKESMAS DUMAGIN	INDRADEWI MOKOGINTA NIP. 19780416 200801 2 015	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; c. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; d. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; e. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; f. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; g. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; h. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; i. pengelolaan surveilans kesehatan; j. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa; k. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; l. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; m. operasional pelayanan puskesmas; n. pengelolaan pelayanan kesehatan malaria; o. pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi; p. pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak; q. pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan; r. pengelolaan layanan imunisasi; dan

SW

				s. bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
18.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA		RILLA VENIA LALU, SKM, MPH NIP. 19941113 202012 2 015	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; c. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; d. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; e. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; f. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; g. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; i. pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; j. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; k. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; l. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; m. pengelolaan surveilans kesehatan; n. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa; o. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; p. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; q. operasional pelayanan puskesmas; r. pengelolaan pelayanan kesehatan malaria; s. pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi; t. pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak;

GN

				u. bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
19.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		dr. SALDY MOKODONGAN, M.Si NIP. 19790529 200802 1 001	<p>PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; b. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; c. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; d. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; e. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; f. pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; g. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; h. penyediaan jasa pelayanan umum kantor; i. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas jabatan; j. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; k. pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; l. pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan; m. pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan; n. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; dan o. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar.

4v

20.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	LASYA L. MAMONTO, S.Pt., ME. NIP. 19780905 200212 2 003	HENGKI PASAMBUNA, SE NIP. 19790908 201001 1 010	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: a. analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan; dan b. pengelolaan dana darurat dan mendesak.
-----	--	--	--	---

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU